

**PERSOALAN DAYA SAING PENDIDIKAN ISLAM DITINJAU DARI
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

***ISLAMIC EDUCATION COMPETITIVENESS REVIEW FROM THE ANALYSIS
OF EDUCATION POLICY***

Sakolan

Institut Agama Islam (IAI) Dar Aswaja Rokan Hilir
sakolan@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menguraikan kebijakan pendidikan di Indonesia dan menjelaskan pentingnya kebijakan, fungsi kebijakan, arah dan karakteristik kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendekatan yang digunakan dalam presentasi ini bersifat deskriptif, dengan mengacu pada situasi hukum saat ini, tulisan-tulisan para profesional pendidikan, dan teori-teori terkait. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang kebijakan pendidikan Indonesia dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang penyesuaian dan perubahan seiring dengan meningkatnya Age of Society 5.0. Hal ini menjadi keharusan bagi manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan upaya penguatan dan peningkatan peran sekolah.

Kata Kunci: daya saing, pendidikan Islam, kebijakan pendidikan.

Abstract

This paper describes education policy in Indonesia and explains the importance of policies, policy functions, directions and characteristics of policies in the implementation of regional autonomy. The approach used in this presentation is descriptive in nature, with reference to the current legal situation, the writings of educational professionals, and related theories. This presentation aims to provide a brief overview of Indonesia's education policy and can be used as a basis for more in-depth and comprehensive research on adjustment and change as Age of Society 5.0 advances. This is a must for education management to improve the quality of graduates. School-Based Management (SBM) is an effort to strengthen and increase the role of schools.

Keywords: *competitiveness, Islamic education, education policy*

A. Pendahuluan

Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM bangsa tersebut. Perkembangan kualitas SDM Indonesia tidak terlepas dari sejarah

intervensi pemerintah dalam dunia pendidikan.¹ Pada jaman kolonialisme, penduduk sengaja dibuat bodoh dengan hanya mengijinkan anak orang-orang yang pro-pemmerintah kolonial yang dapat bersekolah. Hasilnya adalah mayoritas penduduk Indonesia buta huruf (il-literate) dan bermental rendah (inferior). Sedikit penduduk yang berpendidikan rendah tetap mengabdikan pada birokrasi pemerintah penjajah.

Pada masa orde lama sampai orde baru, pendidikan tidak pernah mendapatkan prioritas dalam program pembangunan nasional. Alokasi belanja negara hanya antara 2,5 – 4% dari total APBN. Dalam bentuk berbeda, baik orde lama maupun orde baru lebih mementingkan pengendalian kekuasaan dari pada memajukan kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM Indonesia merupakan akibat pembodohan terstruktur sejak berabad-abad lamanya. Penjajahan selama lebih 3,5 abad menjadikan bangsa Indonesia inferior dan selalu pasrah pada keadaan, rendah diri dan tidak kreatif. Kalaupun mau berusaha, cukup puas hanya pada tataran pencapaian rata-rata (mediocre achievement).

Ada banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya kualitas SDM penduduk Indonesia, diantaranya adalah kemiskinan dan pendidikan.² Berkaitan dengan keteringgalan di bidang pendidikan, problem yang harus segera ditangani adalah: rendahnya partisipasi pendidikan, banyaknya guru/dosen yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi, tingginya angka putus sekolah, dan tingginya jumlah warga negara yang masih buta huruf. Terkait dengan rendahnya partisipasi pendidikan, data Depdiknas 2006 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A baru mencapai 94,73%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 88,68%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C sebesar 55,22%, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi baru mencapai 16,70%.³

Berkaitan dengan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, laporan Diknas tahun 2006 menjelaskan baru mencapai target 35,6% saja.⁴ Jadi, sebanyak 64,4% guru belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sedangkan, dosen yang memenuhi kualifikasi S2/S3 baru mencapai 54,02%. Jadi, masih ada sebanyak 45,08% dosen yang belum

¹ Fitrah, M. (2018). Urgensi sistem penjaminan mutu internal terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(01), 76-86.

² Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan, W. (2016). Faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara. *INOVASI*, 12(1), 29-48.

³ Safira, N., & Wibowo, Y. H. (2021). Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sebagai indikator keberhasilan pendidikan indonesia. *PAKAR Pendidikan*, 19(2), 101-115.

⁴ Akmalia, A. R., Adnan, M., & Taufiq, A. (2013). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pematang Pada Periode 2006-2010. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(1), 51-65.

memenuhi kualifikasi S2/S3. Adapun mengenai tingginya angka putus sekolah, tercatat bahwa angka putus sekolah tingkat SD sebanyak 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%. Bahkan, berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, hingga akhir tahun 2006, masih 12,88 juta penduduk Indonesia, tersebar di pedesaan dan perkotaan, yang buta aksara. Kondisi ini memang sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di tahun 2005 yang sebanyak 14.595.088 orang.⁵ Walaupun demikian, masih belum mampu mengeluarkan Indonesia dari kelompok negara-negara (ada 34 negara) di dunia yang jumlah penduduk buta aksaranya di atas 10 juta orang.

Reformasi di Indonesia seakan menjadi cahaya impian yang akan memberikan banyak perubahan kehidupan bagi bangsa ini, khususnya pada sektor pendidikan. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian, justru pendidikan di bumi Indonesia semakin menjadi problem baru, yakni lahirnya ambiguisitas dalam wilayah pendidikan yang terus berjalan di Indonesia. Kondisi ironis pendidikan tersebut adalah mengenai goal setting yang ingin dicapai system. pendidikan. Gambaran riil adalah lahirnya tipe mechanic student di mana setiap peserta didik sudah diposisikan pada orientasi pasar sehingga pendidikan bukan lagi berbasis keilmuan dan kebutuhan bakat peserta didik.⁶ Selain itu, munculnya mitologi ruang pendidikan yang dikukuhkan dengan ritual pendidikan. Artinya, anak bangsa dihadapkan pada ritual kompetisi, pemilihan sekolah favorit, penyuguhan uang “persembahan”, pemakaian seragam baru, pembelian “ramuan-ramuan” buku-buku paket baru, dan segudang ritual lain. Muncul, ambiguisitas kebijakan pemerintah yang sebenarnya sebagai pengelola potensi anak bangsa, namun pemerintah justru menjadi penjaga mitos pendidikan. Pemerintah dengan sangat percaya diri memilih posisi lebih berpihak pada kalangan elite, maka muncul adigium lelang pendidikan.

Permasalahan pendidikan di Indonesia secara umum, kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Berbagai indikator kuantitatif dikemukakan berkenaan dengan keempat masalah di atas, antara lain analisis komparatif yang membandingkan situasi pendidikan antara negara di kawasan Asia. Keempat masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasar, dan multidimensional,

⁵ Silitonga, D. (2010). Aspek-aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan: Pendidikan dalam Perspektif Politik di Indonesia. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 13(3), 62-82.

⁶ Hakim, L. (2017). Penataan Pendidikan Islam Bermutu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), 17-27.

sehingga sulit dicari ujung pangkal pemecahannya.⁷ Permasalahan ini terjadi pada pendidikan secara umum di Indonesia, termasuk pendidikan Islam yang dinilai justru lebih besar problematikanya.

Dalam perkembangan dunia pendidikan, berbagai teori dikembangkan para tokoh pendidikan. Perkembangan tersebut telah memberi warna yang beragam terhadap pola pendidikan. Teori pendidikan empirisme, nativisme dan konvergensi menjadi rujukan dan sumbangsih yang mempengaruhi dalam perkembangan dunia pendidikan. Qs. Ar-Ra'du ayat 11 menjelaskan:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنِّ وَّآلٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS Ar-Ra'd: 11).

Sehubungan dengan itu semua, dosen dan guru harus bekerja secara kreatif, dinamis, dan mampu melahirkan ide-ide baru secara inovatif, tidak hanya mengajar, menghitung absensi mahasiswa, membaca paper mahasiswa, dan mendampingi mahasiswa belajar. Lebih dari itu, dosen harus kreatif melahirkan teori dan teknologi dalam bidangnya, menurunkan ide-ide besar menjadi sebuah aksi atau tindakan nyata, dan menghasilkan karya-karya inovatif baru yang akan mampu mendorong pemajuan ekonomi bangsa dan pemajuan ilmu serta peradaban. Sebagai ilmuwan dosen harus memiliki agenda penelitian yang dinamis, berfikir untuk melahirkan teori dan teknologi baru atau instrumen baru, sehingga hasil-hasil karya dosen tersebut bisa digunakan baik dalam industri, jasa, maupun kehidupan sosial.

Pendidikan Islam juga dihadapkan dan terperangkap pada persoalan yang sama, bahkan apabila diamati dan kemudian disimpulkan pendidikan Islam terkukung dalam kemunduran, keterbelakangan, ketidak berdayaan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non Islam. Katakan saja, pendidikan Islam terjebak dalam lingkaran yang tak kunjung selesai yaitu persoalan tuntutan kualitas, relevansi dengan

⁷ Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05).

kebutuhan, perubahan zaman, dan bahkan pendidikan apabila diberi “embel-embel Islam”, dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan Tetapi pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dalam Undang- Undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional.

Jadi, sistem pendidikan itu satu yaitu memanusiaikan manusia, tetapi pendidikan memiliki banyak wajah, sifat, jenis dan jenjang [pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, pondok pesantren, madrasah, program diploma, sekolah tinggi, institusi, universitas, dsb], dan hakekat pendidikan adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiaikan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah.

Pendidikan Islam menjadi satu dalam sistem pendidikan nasional, tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering “dinobatkan” hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin, memproduksi orang yang eksklusif, fanatik, dan bahkan pada tingkah yang sangat menyedihkan yaitu “terorisme-pun” dianggap berasal dari lembaga pendidikan Islam, karena pada kenyataannya beberapa lembaga pendidikan Islam “dianggap” sebagai tempat berasalnya kelompok tersebut.⁸ Walaupun “anggapan” ini keliru dan dapat ditolak, sebab tidak ada lembaga-lembaga pendidikan Islam manapun yang bertujuan untuk memproduksi atau mencetak kelompok-kelompok orang seperti itu. Tetapi realitas di masyarakat banyak perilaku kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem, proses, dan orientasi pendidikan Islam.

Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, muncul tuntutan masyarakat sebagai pengguna pendidikan Islam agar ada upaya penataan dan modernisasi sistem dan proses pendidikan Islam agar menjadi pendidikan yang bermutu, relevan, dan mampu menjawab perubahan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dengan demikian, penataan model, sistem dan proses pendidikan Islam di Indonesia merupakan suatu yang tidak terelakkan.

⁸ Sanaky, H. A. (2008). Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu. *el-Tarbawi*, 1(1), 83-97.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Daya Saing Pendidikan Islam

Untuk mengejar ketertinggalan daya saing global, kebijakan di bidang pendidikan harus konsisten dan berkelanjutan. Indonesia harus segera melakukan strategi baru dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan yang berkualitas. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan kompetitif. Alokasi dana APBN yang diamanatkan UUD 45 minimal 20% dari APBN dan ketentuan lainnya wajib segera diimplementasikan, bukan hanya sekedar angin surga atau tebar pesona belaka.⁹

Dalam perjalanan bangsa Indonesia yang sudah mencapai usia lebih dari 75 Tahun ini, kita ‘perlu mengadakan refleksi ulang sekaligus reposisi terhadap sistem pendidikan kita, mengingat bahwa anak-anak bangsa yang terdidik merupakan aset yang paling berharga untuk menghasilkan *human capital* yang berdaya saing serta mampu mengubah Indonesia dari *developing country* menjadi *developed country*. Untuk itu perlu dicari sistem pendidikan nasional yang lebih cocok sekaligus sistem evaluasinya. Sungguh disadari bahwa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dalam sejarah perjalanan bangsa yang sudah melewati usia 75 tahun ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan. Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar yaitu masalah perluasan dan pemerataan, masalah mutu, relevansi dan daya saing pendidikan serta masalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surat Al-Kahfi: 65:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا

Artinya: *Yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.”* (Al-Kahfi: 65)

Uraian-uraian yang penulis sampaikan di atas bahwa pendidikan menurut al-Qur'an dan hadits sangat luas, meliputi pengembangan semua potensi bawaan manusia yang merupakan rahmat Allah.¹⁰ Potensi-potensi itu harus dikembangkan menjadi kenyataan berupa keimanan dan akhlak serta kemampuan beramal dengan menguasai ilmu (dunia–akhirat) dan keterampilan atau keahlian tertentu sehingga mampu memikul amanat dan tanggung jawab sebagai seorang khalifah dan muslim yang bertaqwa.

⁹ Bana, K. L., & Pantur, F. (2013). *Ande Agas: Si Bocah Nasi Kaget*. Absolute Media.

¹⁰ Purnamasari, D. (2017). Pendidikan karakter berbasis al-quran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 1-24.

Tidak bisa disangsikan lagi, bahwa pendidikan memiliki peran dan kontribusi penting dalam mewujudkan bangsa yang tangguh dan bermartabat. Dalam konteks bangsa Indonesia, para pendiri bangsa ini telah memandang penting akan hakikat pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yang menegaskan: "Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Bahkan, dalam Pasal 31 ayat (1) Amandemen UUD 1945 secara tegas mengamanatkan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Hal ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".¹¹

Ini berarti bahwa pembangunan dibidang pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk memajukan sebuah bangsa. Perubahan, kemajuan, dan peradaban sebuah bangsa yang tangguh dan bermartabat hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu, Pendidikan harus dijadikan landasan dan paradigma utama dalam mempercepat pembangunan bangsa. Karena itu, dalam pengembangan kebijakan bidang pendidikan, pemerintah tidak bisa melakukannya dengan pasif, statis dan sebagai rutinitas belaka, yang tidak memiliki orientasi jelas. Tetapi, pembangunan pendidikan harus dilakukan secara dinamis, konstruktif dan dilandasi semangat reformis, kreatif, inovatif dengan wawasan jauh ke depan. Pembangunan sektor pendidikan haruslah menghasilkan sistem nilai yang mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan aman.¹²

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu: 1) Mewujudkan Negara Indonesia yang aman dan damai, 2) Mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis, dan 3) Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut, masyarakat terdidiklah yang akan mudah didorong dan mau diajak berubah untuk mengembangkan

¹¹ Santriati, A. T. (2022). Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia. *Opinia de Journal*, 2(1), 46-69.

¹² Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

sistem kehidupan yang aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera. Pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹³

Pemerintah telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005 – 2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan meningkatnya tata pemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus mampu menghadirkan pemerataan pendidikan yang bermutu pada setiap sisinya. Dalam konteks outcome, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang. Pembangunan pendidikan hendaknya dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subyek yang bermutu. Membangun manusia seutuhnya berarti mengembangkan seluruh potensi manusia melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa yang dilakukan seiring dengan pembangunan peradaban bangsa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pendidikan nasional harus berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia memang telah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia serta berkompetisi dalam percaturan global.¹⁴

Kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan harus diselenggarakan oleh pemerintah, adalah karena pendidikan merupakan pondasi dasar (*basic fundamental*) untuk menyiapkan SDM bangsa yang berkualitas. Menurut Alder, ada beberapa tujuan pokok dan utama dari diselenggarakannya pendidikan pada semua

¹³ Yanuarti, E. (2016). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat Idealisme. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).

¹⁴ Muhaemin, B. (2017). Kebijakan Pengembangan Pendidikan. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 1-14.

situasi dan kondisinya, yaitu: 1) menyiapkan anak didik menjadi orang yang bermoral, 2) menyiapkan anak didik menjadi seorang warga negara yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan 3) menyiapkan anak didik menjadi orang dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan dengan cara memberikan keterampilan dasar yang umum bagi semua pekerjaan di dalam suatu masyarakat.¹⁵

Dunia pendidikan diharapkan mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan kondisi jaman yang terus berubah. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus adaptif dan akomodatif serta responsif dengan perkembangan globalisasi informasi yang terus terjadi. Dalam hal ini, tentu saja dituntut adanya mutu pendidikan yang berkualitas tinggi. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas mutu pendidikan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan proses belajar mengajar serta sistem penilaian. Maka, dilihat dari segi prosesnya, pendidikan dapat dikatakan berkualitas, apabila kegiatan belajar mengajar yang dilakukan kepala sekolah di sekolah berlangsung secara efektif dan peserta didik memperoleh pengalaman yang bermakna dan diarahkan pada pengembangan pribadi unggul, sehingga menjadi SDM yang kompetitif dan mandiri. Dengan demikian, adanya proses pendidikan yang baik akan memberikan jaminan dihasilkannya SDM yang berkualitas pula.

Pendidikan dapat dinilai berhasil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, ketika ia berhasil membentuk anak bangsa yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Atau dalam istilah UNESCO (1996) mampu *moulding the character and mind of young generation*.¹⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini berarti praktik pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan seluruh potensi manusia secara utuh; melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa. Dalam

¹⁵ Permadi, Y. A., Purba, R. A., Saputro, A. N. C., Panggabean, S., Herlina, E. S., Kholifah, N., ... & Fauzi, A. (2021). *Pengantar Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.

¹⁶ Hadi, S., & Pianto, H. A. Menggali Peluang Usaha dengan Modal Kecil di Pedesaan. *PROSIDING*, 65.

konteks *outcome*, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang.¹⁷

2. Penataan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari pendidikan Islam tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Terasa janggal dan lucu, dalam komunitas masyarakat muslim terbesar, pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Selain itu, paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional, sebab pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas. Maka, perhatian pemerintah yang dicurahkan pada pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang *sosialistis religious*. Dari sinilah timbul pertanyaan, bagaimanakah kemampuan pendidikan Islam di Indonesia untuk menata, mengatasi, dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi menuju pendidikan bermutu dan unggul.¹⁸

Langkah awal yang diperhatikan untuk melakukan penataan pendidikan Islam, harus menganalisis dari aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. *Pertama*, pendidikan Islam [pesantren, madrasah, sekolah yang bercirikan Islam, dan perguruan tinggi] lebih besar > 80 % dikelola oleh swasta. Dalam pengelolaannya lebih percaya dan hormat pada ulama, percaya bahwa guru mengajarkan sesuatu yang benar, panggilan agama, ibadah, ikhlas, murah, merakyat. Hal ini merupakan kekuatan [*strengt*] dalam pengelolaan pendidikan Islam. *Kedua*, kelemahan [*weakness*], bahwa pendidikan Islam posisinya lemah, tidak profesional hampir disemua sektor dan komponennya, stress, terombang-ambing antara jati dirinya, apakah ikut model sekolah umum atau antara ikut Diknas dan Depag. Belum ada sistem yang mantap dalam pengembangan model pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. *Ketiga*, kesempatan [*opportunities*], bahwa dalam UU No.20 Th. 2003 memberi kesempatan atau momentum pengembangan pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan Islam diakui sama dengan pendidikan yang lain. *Keempat*, ancaman [*treat*], bahwa banyak lembaga pendidikan lain yang lebih tangguh dan

¹⁷ Halimah, S. (2018). integrasi nilai-nilai agama dan karakter Dalam kurikulum pendidikan guru Mengacu KKNi dan SNPT. *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).

¹⁸ Karo, T. K. (2019). Pemetaan Permasalahan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Langkah-Langkah Mengatasinya. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 18-18.

berkualitas, Ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat berlum terkejar oleh pendidikan Islam, pendidikan Islam kehilangan jati dirinya, pendidikan Islam selalu menjadi warga kelas dua tercabut dari akar budaya komunitas muslimnya. Dalam perspektif pendidikan, mungkin akan bertanya mampukah kita menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang menghasilkan lulusan-lulusan yang "mampu memilih" tanpa kehilangan peluang dan jati dirinya.¹⁹

Memang samapi sekarang, perlakuan pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan Islam masih tetap sama, diskriminatif. Sikap inilah yang menyebabkan pendidikan Islam sampai detik ini terpinggirkan. Terpinggirnya pendidikan Islam dari persaingan sesungguhnya dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, *pertama*, meliputi manajemen pendidikan Islam yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Hal ini tercermin dari kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang umumnya dikelola secara modern. *Kedua*, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah. Para guru yang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar- mengajar, umumnya lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum, ketrampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan Islam kurang kondusif bagi pengembangan kompetensi profesional guru. *Ketiga*, adalah faktor kepemimpinan, artinya tidak sedikit kepala-kepala madrasah yang tidak memiliki visi, dan misi untuk mau ke mana pendidikan akan dibawa dan dikembangkan. Kepala madrasah seharusnya merupakan simbol keunggulan dalam kepemimpinan, moral, intelektual dan profesional dalam lingkungan lembaga pendidikan formal, ternyata sulit ditemukan di lapangan pendidikan Islam. Pimpinan pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru, melainkan juga lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan birokratis daripada pendekatan kolegial profesional. Mengelola pendidikan bukan berdasar pertimbangan profesional, melainkan pendekatan *like and dislike*, dengan tidak memiliki visi dan misi yang jelas.²⁰

¹⁹ Arief, M. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia (Kajian Upaya Pemberdayaan Dan Rekonstruksi). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1377-1384.

²⁰ Ma'arif, A. S., & di Indonesia, P. I. (1991). *Antara Cita dan Fakta. Yogyakarta: Tiara Wacana.*

3. Pendidikan dan Daya Saing Globalisasi

Membangun sektor pendidikan tidak akan pernah selesai dan tuntas, sepanjang peradaban manusia masih ada. Karena, jika suatu bangsa selesai menangani satu masalah pendidikan, akan tumbuh lagi masalah lain yang baru dalam peradaban itu. Hal ini terjadi karena tuntutan jaman selalu berubah, sebagaimana juga pernah digambarkan oleh John F Kennedy dalam sebuah metafora. *Change is a way of life. Those who look only to the past or present will miss the future.* Proses pendidikan tidak hanya sekadar mempersiapkan anak bangsa untuk mampu hidup dalam masyarakat kini, tetapi mereka juga harus disiapkan untuk hidup di masyarakat yang akan datang yang semakin lama semakin sulit diprediksi karakteristiknya. Gibson menggambarkan betapa sulitnya memprediksi masa depan dalam sebuah ungkapan berikut: *The lesson of the last three decades is that nobody can drive to the future on cruise control.*²¹

Sekarang ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dunia pendidikan kita ternyata masih belum bisa menjawab tantangan kemajuan zaman. Kondisi pendidikan Indonesia juga sudah jauh tertinggal dari negara-negara tetangga sesama ASEAN sekalipun. Berdasarkan laporan UNDP, indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2007 menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia (UNDP) ini menempatkan Indonesia pada posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah

²¹ De Winter, J. C., Happee, R., Martens, M. H., & Stanton, N. A. (2014). Effects of adaptive cruise control and highly automated driving on workload and situation awareness: A review of the empirical evidence. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 27, 196-217.

meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, masih terdapat sebagian anak yang tidak bersekolah, terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan.²²

Demikian pula dengan anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tertinggalnya pembangunan pendidikan di Indonesia akan membawa dampak buruk bagi masa depan anak-anak Indonesia sehingga angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.

Konsekuensinya, pendidikan harus dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses pemberdayaan, yang benar-benar dan harus disadari secara kolektif, yang perlu dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam rangka melakukan investasi masa depan bangsa. Bukan sekadar upaya tambal sulam program yang tidak akan mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa akan menjadi realitas dalam kebijakan dan praksis, jika masyarakat, keluarga, dan pemerintah secara bersama memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pencarian solusi bagi semua persoalan dan tantangan pendidikan yang kita hadapi saat ini dan masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus mampu menanamkan nilai-nilai (*values*) kepada anak bangsa agar memiliki sikap hidup yang toleran, saling mempercayai satu sama lain, sehingga pada akhirnya masyarakat kita memiliki kemampuan untuk hidup dalam berbagai bentuk pluralitas kehidupan.²³

Dalam sistem kehidupan global, penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi eksistensi dan perubahan suatu bangsa. Oleh karena itu, dilihat dari aspek relevansi, era global akan berdampak pada cepat usangnya *hardware* dan *software* bidang pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan harus diberdayakan setiap saat, berkelanjutan, dan tersistem. Ini semua

²² Sanaky, H. A. (2006). Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi antara Mitos dan Realitas. *Dalam Jurnal Ilmuilmu Sosial Unisia*, 62.

²³ Suwartini, S. (2017). Pendidikan karakter dan pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(1).

menurut adanya kemauan dan niat yang kuat untuk selalu menjaga dan menciptakan tingkat unggulan kompetitif yang tinggi. Dan, kita memerlukan inovasi yang pesat dalam dunia pendidikan. Karena, menjadi bangsa yang berharkat memerlukan unggulan kompetitif dalam berbagai bidang. Maka, jika kita ingin menghasilkan berbagai unggulan kompetitif *outcome* pendidikan. Inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pengembangan sektor pendidikan. Tanpa ada inovasi yang signifikan, pendidikan kita hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu tergantung pada pihak lain. Sektor pendidikan juga perlu difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya bangsa, agar kita memiliki unggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global.²⁴

Modal dasar bagi terbentuknya unggulan komparatif dan unggulan kompetitif ialah dimilikinya konsep diri dan kesadaran diri yang dalam pada proses belajar. Konsekuensinya, inovasi dalam wacana pembelajaran menuntut agar semua institusi pendidikan kita mampu menanamkan kemampuan tentang bagaimana belajar untuk belajar bukan belajar untuk menghafal dan belajar untuk tergantung kepada pihak lain. Dengan model pembelajaran seperti itu kreativitas dan tanggung jawab peserta didik akan muncul, dan oleh karena itu unggulan komparatif dan unggulan kompetitif akan dapat dibudayakan.²⁵

Kelemahan proses pembelajaran selama ini terlalu menekankan pada aspek kognitif. Sementara, persoalan afektif yang terkait dengan sistem nilai kurang dapat dikembangkan. Sehingga, berakibat pada lemahnya sistem nilai yang dimiliki oleh para peserta didik. Dan, akibatnya mereka kurang memiliki visi yang jelas mengenai masa depan. Akhirnya, mereka pun kurang menyadari akan pentingnya memiliki unggulan kompetitif untuk mampu hidup wajar di era global.

Oleh karena itu, pendidikan nasional perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya memiliki unggulan kompetitif di masa yang akan datang, agar anak bangsa mampu hidup dalam konteks interdependensi. Tanpa memiliki visi yang jauh ke depan, kita akan terjerebab pada dependensi kehidupan. Kita pun tidak akan mampu menjadi tuan di negara sendiri. Bahkan, tidak mustahil kita justru akan menjadi 'kuli' di negeri sendiri. Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi neoliberal,

²⁴ Sintong, M. (2013). Kebijakan Berwawasan Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Geografi*, 5(1), 17-30.

²⁵ Heryanto, H. (2018). Pendidikan nasional di dalam abad globalisasi. *Generasi kampus*, 7(2).

keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan kemajuan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut *knowledge- driven economic growth*. Konsep ini menempatkan lembaga pendidikan tinggi pada posisi amat penting dan strategis sebab dapat (1) melahirkan tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi teknologi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Pendidikan Islam

Faktor eksternal yang dihadapi pendidikan Islam adalah pertama, adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pemerintah selama ini cenderung menganggap dan memperlakukan pendidikan Islam sebagai anak tiri, khususnya soal dana dan persoalan lain. Katakan saja, alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Diknas. Maka, terlepas itu semua, apakah itu urusan Depag atau Depdiknas, mestinya alokasi anggaran negara pada pendidikan Islam tidak terjadi kesenjangan, toh pendidikan Islam juga bermisi untuk mencerdaskan bangsa, sebagaimana juga misi yang diemban oleh pendidikan umum. Faktor kedua, dapat dikatakan bahwa paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional.²⁶ Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan, lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas. Beberapa indikator yang menunjukkan kesenjangan ini yaitu mulai dari tingkat ketersediaan tenaga guru, status guru, kondisi ruang belajar, tingkat pembiayaan [unit cost] siswa, hingga tidak adanya standardisasi mutu pendidikan Islam, karena urusan pendidikan Islam tidak berada di bawah Depdiknas, dan lebih tragis lagi adalah sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan pendidikan Islam. Faktor ketiga, adalah adanya diskriminasi masyarakat terhadap pendidikan Islam. Secara jujur harus diakui, bahwa masyarakat selama ini cenderung acuh terhadap proses pendidikan di madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Rata-rata memandang pendidikan Islam adalah pendidikan nomor dua dan biasanya bila menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam

²⁶ Usa, Muslih, 1991, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta [Suatu Pengantar]*, Tiara Wacana, Yogyakarta

merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas.

Diakui perkembangan pendidikan Islam pada akhir-akhir ini secara berangsur-angsur mulai terasa kemajuannya, hal ini terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan beberapa model pendidikan yang ditawarkan, yang menunjukkan harapan untuk mampu bersaing. Tetapi masih banyak yang memerlukan penataan. Maka untuk menuju pendidikan yang bermutu dan unggul, pendidikan Islam hendaknya berupaya maksimal untuk membenahi dan melakukan penataan kembali terhadap masalah internalnya, seperti persoalan manajemen, kemampuan kepemimpinan, kompetensi dan profesional guru. Manajemen pendidikan yang bersifat klasik harus ditinggalkan dan berfokus ke manajemen berbasis mutu. Manajemen memiliki visi, misi, *goals* dan strategi yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan. Namun visi, misi dan *goals* pun jangan hanya akan menjadi tumpukan berkas perencanaan yang tidak dapat diwujudkan secara nyata apabila kita tidak memiliki rencana strategi yang baik dan tepat.²⁷

fungsi pendidikan Islam harus dilakukan, terutama pada sistem pendidikan persekolahan harus diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga usahanya dapat menjangkau pada perluasan dan pengembangan sistem pendidikan Islam luar sekolah. Harus dilakukan inovasi kelembagaan dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan harus ditingkatkan etos kerja dan profesionalismenya. Perbaikan pada aspek materi [kurikulum], pendekatan, dan metodologi yang masih berorientasi pada sistem tradisional, perbaikan pada aspek manajemen pendidikan itu sendiri. Tetapi usaha melakukan inovasi tidak hanya sekedar tanbal sulam, tetapi harus secara mendasar dan menyeluruh, mulai dari fungsi, tujuan, metode, strategi, materi [kurikulum], lembaga pendidikan, dan pengelolaannya. Dengan kata lain, penataan pendidikan Islam haruslah bersifat komprehensif dan menyeluruh, baik pada tingkat konsep maupun penyelenggaraan; tidak lagi *ad hoc* dan *incremental* seperti sering terjadi di masa silam. Penataan fungsi pendidikan Islam, tentu dengan memperhatikan dunia kerja, sebab dunia kerja mempunyai andil dan rentang waktu yang cukup besar dalam jangka kehidupan pribadi dan kolektif.

intelektualitas dalam program kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan Islam harus menganut *integrated curriculum*, artinya perpaduan, koordinasi, harmonis,

²⁷ Sanaky, H. A. (2006). *Op.Cit.*

dan kebulatan materi-materi pendidikan dengan ajaran Islam, dan bukan *separated subject curriculum* maupun *correlated curriculum*. Maka dengan konsep *integrated curriculum*, proses pendidikan akan memberikan penyeimbangan antara kajian-kajian agama dengan kajian lain [non-agama] dalam pendidikan Islam yang merupakan suatu keharusan, apabila menginginkan pendidikan Islam kembali survive di tengah perubahan masyarakat. *Ketiga*, perlu dikembangkan pendidikan yang berwawasan kebebasan, sehingga insan akademik dapat melakukan pengembangan keilmuan secara maksimal. Kenapa demikian, karena selama masa kemunduran Islam, telah tercipta stigma dengan dikondisikan banyak sekat dan wilayah terlarang bagi perdebatan, perbedaan pendapat dan pandangan yang mengakibatkan sempitnya wilayah pengembangan intelektual rasional. Kesempatan berijtihad yang selama ini di anggap tertutup juga menjadi malapetaka bagi perkembangan pemikiran “rasional intelektual” dan ikut terkubur. Kita tidak mempunyai ruang bebas untuk mengekspresikan pemikiran, pandangan, dan gagasan. Apabila muncul pemikiran baru yang berbeda dengan *mainstream*, sering kali dianggap sebagai pengkaburan, penyesetan dan penyimpangan dari agama dan kadang kala, kritik terhadap pandangan dan pemikiran keagamaanpun dianggap sebagai kritik terhadap otoritas Tuhan, nabi dan lain-lain. Agama kemudian dijadikan sebagai otoritas baru untuk memasung dan mengkerdikan [membonsai] pemikiran-pemikiran inovatif yang muncul. Maka, dengan upaya menghilangkan atau minimal membuka kembali sekat dan wilayah-wilayah yang selama ini terlarang bagi perdebatan dan kajian, akan menjadikan wilayah pengembangan intelektual semakin luas yang tentu membuka peluang lebar bagi pengembangan keilmuan di dunia pendidikan Islam pada khususnya dan Islam pada umumnya. *Keempat*, mulai melakukan strategi pendidikan yang membumi pada kebutuhan nyata masyarakat yang akan menghantar peserta didik pada kebutuhan akhirat. Mengembangkan pendidikan Islam berwawasan kebudya dan masyarakat, pendidikan yang berwawasan kebebasan dan demokrasi, pendidikan yang menyenangkan dan mencerdaskan. Diperlukan pendidikan yang menghidupkan kembali tradisi intelektual yang bebas, dialogis, inovatif, dan kreatif. Mutu pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dan diupayakan untuk dicapai.²⁸ Sebab pendidikan akan menjadi sia-sia bila mutu proses dan lulusannya rendah, tidak terbangun jiwa jika *out put* pendidikannya menambah beban masyarakat, keluarga, dan

²⁸ Azra, A. (2002). *Pardigma Baru Pendidikan Nasional: rekontruksi dan demokratisasi*. Jakarta: Kompas.

negaranya Saat sekarang ini, ada keinginan dari masyarakat dan berbagai lembaga pendidikan Islam untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai salah satu pendidikan alternatif Tetapi pemikiran ini memerlukan paradigma baru untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Pertanyaannya, pendidikan Islam yang mutu dan unggul yang bagaimana? Apakah kita harus memperbaiki secara radikal terhadap kelemahan-kelemahan pendidikan Islam yang telah diproyeksikan oleh A. Mukti Ali, bahwa kelemahan pendidikan Islam dewasa ini, disebabkan oleh faktor penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi, dan ketajaman interpretasi [*insight*], kelemahan kelembagaan [*organisasi*], kelemahan ilmu dan teknologi. Apabila hal ini menjadi fokus, maka pendidikan Islam harus didesak untuk melakukan inovasi, tidak hanya terkait dengan kurikulum dan perangkat manajemen, tetapi juga strategi dan taktik operasional dan metodologinya. Strategi dan taktik itu, bahkan sampai menuntut perombakan model-model sampai dengan institusi-institusinya untuk mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu dan unggul.

Berbicara tentang pendidikan yang mutu dan unggul, tentu saja harus didasarkan pada suatu standar dan ukuran kemajuan [*benchmark*] tertentu yang terbuka [*accountable*], sehingga publik dengan mudah mengikuti dan menilai kemajuan pendidikan yang ada. Apakah pendidikan yang bermutu dan unggul dapat dilihat dari lulusan dengan nilai tinggi atau dilihat dari lulusannya dapat diserap pasar dengan cepat, ataukah dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional [BAN] dengan predikat terakreditasi dengan nilai A, B, dan C atau tidak terakreditasi memiliki kompetensi untuk mengajar. Apakah pendidikan bermutu.

Selain itu, manusia unggul seperti apa yang dikehendari dari prodak pendidikan, karena bukan sekedar pendidikan yang unggul. Dalam konteks historis, manusia yang dapat dijadikan teladan adalah manusia yang dikategori unggulan bukanlah semata-mata ditentukan lembaga pendidikan yang membesarkannya, malahan lebih banyak dihasilkan oleh keluarga atau masyarakat yang mengelilinginya. Lembaga pendidikan pesantren, biayanya murah, santri banyak yang gratis, dianggap tradisonal, tetapi banyak melahirkan para pahlawan, para tokoh pemikir bangsa. Maka dalam konteks ini, proses pendidikan di pesantren lebih berlaku dan faktor utamanya adalah keteladanan, kesungguhan, kerendahan hati, kesederhanaan, keikhlasan, yang dibangun oleh kiai dan para gurunya dalam proses,

tetapi nilai-nilai ini pada zaman sekarang lebih mendapatkan respons yang kurang baik.²⁹

Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang bermutu dan unggul adalah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, memiliki program pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, inovatif dan pengembangan ilmu dan teknologi, memiliki sumberdaya yang profesional, memiliki manajemen yang profesional dan bertanggungjawab. Lulusannya memiliki standar kompetensi pengetahuan (knowledge) kognitif yang memadai, memiliki kemampuani afektif yang anggun, yaitu memiliki kepribadian dan moral yang tinggi, jujur, bertanggungjawan, dan bersamangat untuk melakukan inovasi, memiliki kemampuan psikomotorik yang tinggi, memiliki skill untuk menjawab kabutuhan masyarakat, melakukan kegiatan secara terampil, dan memiliki kemampuan bertindak yaitu menghasilkan sesuatu yang konkrit dan menghasilkan jasa, serta dapat diserap pasar atau pengguna pendidikan. Dengan dasar ini, maka pendidikan Islam perlu membangun sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dilandasi dengan nilai-nilai *ilahiyyah*, kemanusiaan [*insaniyyah*], lingkungan dan berbudaya, manajemen pendidikan dengan berorientasi pada profesionalisme dan mutu, menyerap aspirasi dan mendayagunakan potensi masyarakat, berorientasi pada otonomi, meningkatkan demokratisasi penyenggaraan pendidikan, serta memenuhi permintaan perubahan arus globalisasi. Katakan saja, konsep hasil belajar yang lebih baik tentu saja berorientasi pada kemampuan kognitif, psikomotorik, afektik, dan tindakan. Kemampuan bertindak terkait erat dengan pendidikan *life skills* (artinya ketika lulusan dari satuan pendidikan Islam, sudah memiliki pengalaman yang cukup memadai dari kehidupan pendidikannya untuk melakukan sesuatu di masyarakat, yaitu berkewajiban mencari, menemukan dan memanfaatkan ilmu bagi keperluan kehidupan umat manusia, sekaligus juga harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi selanjutnya jika dengan ilmu itu menimbulkan kerusakan lingkungan pendidikan Islam harus berupaya untuk: *Pertama*, mengembangkan konsep pendidikan integralistik, yaitu pendidikan secara utuh yang berorientasi pada Ketuhanan, kemanusiaan dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang *rahmatan lil Kedu*a, mengembangkan konsep pendidikan huhanistik, yaitu pendidikan yang berorieintasi dan memandang manusia sebagai manusia [*humanisasi*] dengan

²⁹ *Ibid.*

menghargai hak-hak asasi manusia, hak untuk menyuarakan pendapat walaupun berbeda, mengembangkan potensi berpikir, berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. *Ketiga*, mengembangkan konsep pendidikan pragmatis, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik jasmani maupun rohani dan mewujudkan manusia yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. *Keempat*, mengembangkan konsep pendidikan yang berakar pada budaya yang akan dapat mewujudkan manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya berdasarkan budaya sendiri dan berdasarkan nilai-nilai *ilahiyah*.³⁰

Secara umum konsep pendidikan Islam yang ditawarkan adalah pendidikan yang berorientasi pada kompetensi nilai-nilai ilahiyah, knowledge, skill, ability, social-kultural dan harus berfungsi untuk memberikan kaitan secara operasional antara peserta didik dengan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya, dan selalu menerima dan ikut serta melakukan perubahan

C. Simpulan dan Saran

Kata akhir, pendidikan yang bermutu dan unggul merupakan hal yang harus diperhatikan dan diupayakan untuk dicapai. Pendidikan akan menjadi sia-sia apabila mutu proses dan lulusannya rendah. Penilaian dan pengakuan terhadap pendidikan yang mutu dan unggul atau tidak, akan lebih banyak ditentukan oleh masyarakat profesional. Dengan kata lain, bahwa masyarakat profesional yang akan menjadi penilai [*quality control*] dari lembaga pendidikan yang ada. Kontrol dilakukan dari kemampuan para lulusan lembaga pendidikan tersebut, dengan program-program pembelajarannya, dosen dan guru di nilai oleh masyarakat. Maka, pendidikan Islam berusaha melakukan penataan terhadap program-program pendidikannya agar mencapai standar mutu dan unggul yaitu lulusannya memiliki kompetensi pengetahuan yang memadai, memiliki afektif yang anggun, memiliki skill untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan dapat diserap oleh pengguna pendidikan, apabila tidak maka akan menjadi sia-sia, bila mutu proses dan lulusannya rendah

³⁰ Sirojudin, A. (2019). Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 6(2), 204-219.

Daftar Pustaka

- Akmalia, A. R., Adnan, M., & Taufiq, A. (2013). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang Pada Periode 2006-2010. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(1), 51-65.
- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05).
- Arief, M. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia (Kajian Upaya Pemberdayaan Dan Rekonstruksi). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1377-1384.
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan, W. (2016). Faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kutai kartanegara. *INOVASI*, 12(1), 29-48.
- Azra, A. (2002). *Pardigma Baru Pendidikan Nasional: rekontruksi dan demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Bana, K. L., & Pantur, F. (2013). *Ande Agas: Si Bocah Nasi Kaget*. Absolute Media.
- De Winter, J. C., Happee, R., Martens, M. H., & Stanton, N. A. (2014). Effects of adaptive cruise control and highly automated driving on workload and situation awareness: A review of the empirical evidence. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 27, 196-217.
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Fitrah, M. (2018). Urgensi sistem penjaminan mutu internal terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4(01), 76-86.
- Hadi, S., & Pianto, H. A. Menggali Peluang Usaha dengan Modal Kecil di Pedesaan. *PROSIDING*, 65.
- Hakim, L. (2017). Penataan Pendidikan Islam Bermutu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 15(1), 17-27.
- Halimah, S. (2018). integrasi nilai-nilai agama dan karakter Dalam kurikulum pendidikan guru Mengacu KKNi dan SNPT. *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).
- Heryanto, H. (2018). Pendidikan nasional di dalam abad globalisasi. *Generasi kampus*, 7(2).
- Karo, T. K. (2019). Pemetaan Permasalahan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Langkah-Langkah Mengatasinya. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 18-18.
- Ma'arif, A. S., & di Indonesia, P. I. (1991). *Antara Cita dan Fakta*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhaemin, B. (2017). Kebijakan Pengembangan Pendidikan. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 1-14.
- Permadi, Y. A., Purba, R. A., Saputro, A. N. C., Pangabean, S., Herlina, E. S., Kholifah, N., ... & Fauzi, A. (2021). *Pengantar Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purnamasari, D. (2017). Pendidikan karakter berbasis al-quran. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 1-24.

- Safira, N., & Wibowo, Y. H. (2021). Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sebagai indikator keberhasilan pendidikan indonesia. *PAKAR Pendidikan*, 19(2), 101-115.
- Sanaky, H. A. (2006). Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi antara Mitos dan Realitas. *Dalam Jurnal Ilmuilmu Sosial Unisia*, 62.
- Sanaky, H. A. (2008). Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu. *el-Tarbawi*, 1(1), 83-97.
- Santriati, A. T. (2022). Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia. *Opinia de Journal*, 2(1), 46-69.
- Silitonga, D. (2010). Aspek-aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan: Pendidikan dalam Perspektif Politik di Indonesia. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 13(3), 62-82.
- Sintong, M. (2013). Kebijakan Berwawasan Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Geografi*, 5(1), 17-30.
- Sirojudin, A. (2019). Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 6(2), 204-219.
- Suwartini, S. (2017). Pendidikan karakter dan pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(1).
- Usa, Muslih, 1991, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta [Suatu Pengantar]*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Yanuarti, E. (2016). Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat Idealisme. *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).